



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)  
**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AMALIAH AN NUUR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **846708**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>730.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 171 m2/171 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 200.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 189 m2/189 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/149 m2 di KAB / KOTA KOTA SAMARINDA , WARISAN Rp. 230.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>215.000.000</b>
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS 1.5 R AT F80RG-GOMFJ Tahun 2020, Rp. 200.000.000		
2. MOTOR, HONDA NF125 TR S-MTR/SOLOPD Tahun 2010, Rp. 15.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>9.000.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>----</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>6.300.000</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>7.468.000</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>967.768.000</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>550.231.320</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>417.536.680</b>

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.